

CERTIFICATE OF ORIGINALITY

To Whom It May Concern:

This is to certify that the following document has been checked for originality with premium plagiarism checker. The result is as follows:

Originality Report	
Document Title	Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi
Author(s)	Yulianto Kadji
Similarity Found	11%
Statistics	1238 words Plagiarized / 9094 Total words
Remark(s)	Low Plagiarism Detected
Internet Sources	
<p><1% - www.slideshare.net/HidayatHFRocketmail/skripsi... <1% - repository.ung.ac.id/.../1/Pemetaan...Di-Kota-Gorontalo.pdf <1% - fitrianiibjasmanssev.blogspot.com/.../kondisi-pendidikan... <1% - www.scribd.com/.../10857091/pembangunan-pendidikan <1% - smpn1curugtangerang.wordpress.com/2008/10/26/... <1% - masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/12/19/... <1% - insinyurpendidikan.blogspot.com/2012/01/uu-sisdiknas-no... <1% - pendidikandankebudayaan.wordpress.com/2012/06/06/... <1% - perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, sejarah dan berkesinambungan . <1% - repository.ung.ac.id/get/simlit/2/1005/1/...Bersubsidi-Di... <1% - repository.ung.ac.id/get/simlit/2/...Kebijakan-Pendidikan... <1% - www.slideshare.net/yeftachristiono/tugas-jurnal... <1% - dimana tidak ada pengertian biaya, kecuali bagi siswa yang berasal dari</p>	

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

keluarga miskin.

<1% - informatikalen.blogspot.com/2014/08/contoh...

<1% - www.pengertianpakar.com/2015/...proses-kebijakan-publik.html

<1% - robisukron.blogspot.com/2015/01/kebijakan-publik-beserta...

<1% - setiya21.wordpress.com/2009/12/17/kebijakan-publik

<1% - www.academia.edu/12950415/Teori_Kinerja

<1% - erfansetiawan.blogspot.com/2011/...pembuatan-kebijakan.html

<1% - www.scribd.com/document/368420262/digital-129265...

<1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/04/makalah-tujuan...

<1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/...ilmu-kebijakan.html

<1% - asmoni-best.blogspot.com/2009/04/...analisis-kebijakan.html

<1% - kebijakanpublik12.blogspot.com/2012/05/pengertian...

<1% - kebijakanpublik12.blogspot.com/2012/05

Date: Friday, September 28, 2018



Novriyanto Napu, M.AppLing., Ph.D.

Director

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Originality Report

Similarity Found: 11%

Date: Friday, September 28, 2018

Statistics: 1238 words Plagiarized / 9094 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendiskripsikan dan Menganalisa proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo; (2) Menganalisa dan mengetahui pelaku proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo; dan (3) Menganalisa serta mengetahui dampak implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo, baik pada tingkat Pendidikan Dasar maupun pada Tingkat Pendidikan Menengah.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang pelaksanaannya terbagi dalam beberapa tahapan yaitu Focus Group Diskusi dan Wawancara Mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses Implementasi Kebijakan terlaksana melalui tahapan perencanaan ditingkat Sekolah dan Dinas Pendidikan, yang dilanjutkan dengan tahapan penganggaran ditingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gorontalo.

Kemudian proses monitoring dan evaluasi secara internal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo; (2) Adapun pelaku implementasi kebijakan program pendidikan bersubsidi di Kota Gorontalo terdiri atas Komite Sekolah, Kepala Sekolah dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, BAPPEDA Kota Gorontalo, DPPKAD Kota Inspektorat Kota Gorontalo, DPPKAD Kota Gorontalo, dan DPRD Kota Gorontalo.

Implementasi kebijakan ini memiliki beberapa dampak positif yakni: (a) Dampak Pendidikan, di mana indikator pendidikan Kota Gorontalo meningkat dan menjadi lebih baik, khususnya terkait dengan penurunan Angka Putus Sekolah, dan naiknya Angka Partisipasi Murni, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Rata-rata Lama Sekolah; (b) Dampak Sosial Budaya, di mana ikatan kekerabatan dan kekeluargaan,

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



semangat kepedulian, dan gotong royong diantara orang tua murid semakin baik; dan
(c) Dampak ekonomi seperti kenaikan pada PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita masyarakat Kota Gorontalo .

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan kuasa-Nya, penelitian yang berjudul Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo tahun 2014 bisa kami selesaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung penelitian ini, khususnya pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dan pihak Lembaga Penelitian UNG yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk dapat melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo bersama jajarannya, Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Inspektur Inspektorat Kota Gorontalo dan para orang tua murid yang tergabung dalam komite sekolah atas dukungan dan partisipasinya selama proses pengumpulan data, wawancara mendalam maupun pada saat pelaksanaan FGD.

Kami menyadari bahwa dalam kegiatan penelitian ini masih banyak kekurangan dalam proses penulisan maupun dalam proses penyelesaiannya, karena berbagai kendala teknis yang kami hadapi. Oleh karena itu kami memohon maaf jika sekiranya masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun pembuatan laporan penelitian ini.
Penulis

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Permasalahan Pendidikan adalah kebutuhan esensial untuk menyiapkan peserta didik melalui aktifitas bimbingan, pengajaran dan/atau latihan untuk perannya di masa yang akan datang. Seperti yang diamanatkan oleh PerMenDiknas (No.48 Tahun 2010) tentang Rencana Strategis bahwa "salah satu arah kebijakan pembangunan pendidikan adalah **mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia**".

Selanjutnya dalam Narasi bidang Pendidikan, kebijakan perluasan, peningkatan, dan pemerataan pendidikan dilakukan melalui antara lain penyediaan berbagai beasiswa serta bantuan dana operasional sekolah yang implementasinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah dikeluarkan sebagai landasan hukum bagi partisipasi** masyarakat dalam pembangunan pendidikan yakni dengan menggunakan pendekatan sukarela (voluntary basis), kabupaten/kota didorong untuk

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

membentuk dewan pendidikan yang dapat berperan sebagai (a) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (b) pendukung baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (c) pengontrol dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi pendidikan, pemerintah kabupaten/kota telah mempunyai otoritas yang lebih luas dalam meningkatkan pendidikan di masing-masing wilayah sejak dalam perencanaan, penetapan prioritas program dan juga mobilisasi sumberdaya untuk mewujudkan rencana yang telah dirumuskan. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota pendidikan yang sangat peduli dengan upaya peningkatan pendidikan baik dasar maupun menengah.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No: 20 tahun 2003 yakni "sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, pendidikan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan".

Dengan melaksanakan aturan diatas maka pemerintah Kota Gorontalo telah melakukan legislasi dalam bidang pendidikan, yang telah diterapkan sejak tahun 2005 dan dianggarkan dalam APBD di setiap tahunnya.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Seperti yang disampaikan oleh Walikota Gorontalo pada upacara memperingati hari pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2012 tentang surat keputusan Walikota Gorontalo berkaitan dengan pendidikan bersubsidi yang akan diimplementasikan di kota Gorontalo.

Pendidikan bersubsidi merupakan pendidikan dengan biaya yang ringan bagi siswa SD/SMP yang kurang mampu agar mereka bisa memperoleh layanan pendidikan dasar. Menurutnya, pengembangan pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab orangtua, masyarakat dan seluruh pihak yang berkompeten didunia pendidikan. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.20 tahun 2003 (pasal 46) tentang sistem pendidikan nasional yakni "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Kebijakan ini dilaksanakan antara lain untuk mengurangi angka putus sekolah (dropout) pada tingkat pendidikan dasar". Hal yang serupa disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional; Mohamad Nuh dalam (Media bisnis Indonesia: 27 Maret 2012)

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



“bahwa pendidikan merupakan investasi yang strategis sehingga pemerintah harus meningkatkan jumlah penerima subsidi siswa miskin, tujuannya agar anak-anak tetap bisa sekolah dan tidak terjadi drop out”

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Potret kondisi pendidikan di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa biaya sekolah yang tinggi masih menjadi beban bagi siswa yang tidak mampu serta menjadi permasalahan utama di sektor pendidikan.

Untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, maka perlu adanya Pendidikan bersubsidi di Kota Gorontalo seperti yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota No:136/17/V/2012 tentang Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo. Belakangan ini, pemerintah sudah menyiapkan sebuah paket bantuan pendidikan yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan total anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk menghadapi dampak terburuk dari meningkatnya inflasi. BSM adalah gagasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berupa penyediaan dana sebesar Rp. 450.000 untuk setiap pelajar di tingkat SD, Rp. 700.000 bagi pelajar SMP, dan Rp. 1.000.000 bagi pelajar SMA per tahunnya.

Besar anggaran pendidikan kita di Kemendiknas berjumlah hampir Rp. 64 triliun. Tentu angka sebesar ini harus dipertimbangkan kembali, dengan cara membagi subsidi untuk setiap tingkat pendidikan. Menurut logika bisnis pendidikan, pola pengeluaran anggaran pemerintah yang tidak seimbang menjadi salah satu penyebab distribusi pendapatan yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat. Kelompok orang mampu menikmati lebih banyak subsidi dari APBN dibandingkan dengan masyarakat miskin.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Memperbaiki biaya pendidikan, tanpa harus mempertimbangkan kemungkinan perbaikan kualitas, sebagai akibat dari perbaikan sistem insentif, adalah salah satu bentuk reformasi harga untuk memperbaiki pengaruh anggaran terhadap distribusi pendapatan. Mengingat pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perbaikan distribusi pendapatan di Kota Gorontalo, maka porsi pengeluaran untuk pendidikan pun harus meningkat. Tapi, prioritasnya yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kebutuhan mayoritas penduduk Gorontalo.

Oleh sebab itu, akses pendidikan untuk kelompok tidak mampu perlu dibuka seluas-luasnya. Konsepnya, pemerataan tanpa membeda-bedakan siswa pintar dan tidak pintar dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah harus terus dilanjutkan dan diawasi. Adapun aturan subsidi pendidikan di Kota Gorontalo yang tengah dijalankan adalah implementasi subsidi silang pada pembiayaan pendidikan.

Dimana tidak ada penggratisan biaya, kecuali bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sedangkan siswa yang berasal dari keluarga mampu harus membayar biaya sekolah. Biaya pendidikan siswa tidak mampu bersumber dari subsidi silang siswa yang mampu. Penerapan program kegiatan tersebut sedang dilaksanakan pada setiap sekolah di Kota Gorontalo sebagai sebuah bentuk kebijakan, inovasi dan implementasi tata kelola pendidikan

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

agar siswa yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah dengan meningkatkan mutu layanan melalui pemerataan, partisipasi dan investasi pendidikan. 1.2

Rumusan Masalah Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo Siapa pelaku proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo Bagaimana dampak dari implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo, baik pada tingkat Pendidikan Dasar ataupun pada Tingkat Pendidikan Menengah. 1.3

Luaran/Bentuk Hasil Penelitian Hasil penelitian ini, wajib dipublikasikan dalm jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal bereputasi Internasional. Dan untuk luaran tambahan dari penelitian ini yakni : Desain kebijakan/model implementasi kebijakan program pendidikan bersubsidi dalam perspektif otonomi daerah. Dalam bentuk bahan ajar. 1.4

Kebaruan Dalam Bidang Penelitian Berdasarkan pengamatan peneliti dari berbagai referensi yang ada, kajian tentang Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Kebijakan Kebijakan publik didefinisikan oleh Dye sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan sehingga harus memiliki tujuan.

Kebijakan publik atau negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah. Sehingga, kebijakan publik bukan hanya semata-mata berupa pernyataan atau keinginan pemerintah/pejabat pemerintah saja. Sependapat dengan pernyataan Dye diatas, Edward III dan Sharkansky menerangkan kebijakan publik sebagai sesuatu yang dinyatakan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berupa sasaran ataupun tujuan dari berbagai program pemerintahan.

Edward III dan Sharkansky juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut bisa ditetapkan secara jelas dalam beragam peraturan perundang-undangan, ataupun dalam bentuk pidato pejabat pemerintah. Berbagai implikasi dari Pengertian diatas ini menerangkan berbagai implikasi bahwa kebijakan publik mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1.

Selalu memiliki sasaran khusus atau suatu tindakan berorientasi tujuan.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

_Berisi aksi-aksi Pemerintah. _Atau pola _tindakan pejabat __ _Merupakan apa pemerintah. _yang _benar-benar _dilaksanakan oleh __ _Bersifat positif _dalam _arti suatu _tindakan hanya __ _dilakukan dan _negatif _dalam arti _keputusan itu _ _bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan tersebut didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Meskipun terdapat beragam definisi kebijakan negara (Public policy), seperti yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang menjadi ketetapan pemerintah dengan tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. 2.2 Proses dan Lingkungan Kebijakan Publik Proses Kebijakan Publik Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (dalam Subarsono, 2005:9) adalah: Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses aktifitas yang pada dasarnya bersifat politis.

Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas intelektual meliputi: permususan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



/ Gambar 2.1

: Proses Kebijakan Publik menurut Dunn Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahapan aktivitas intelektual dalam proses kebijakan, yakni: 1) perumusan masalah : menyediakan informasi tentang kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah, 2) forecasting (peramalan) : memberikan informasi tentang konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya pilihan-pilihan kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan, 3) rekomendesai kebijakan: memberikan informasi tentang manfaat bersih dari setiap alternatif, dan menyarankan pilihan kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi, 4) monitoring kebijakan: memberikan informasi mengenai konsekuensi

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

sekarang dan masa lalu dari dilaksanakannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya, dan 5) evaluasi kebijakan: memberikan informasi tentang kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Peran sang analis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil benar-benar berlandaskan pada manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan demi keuntungan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, menurut Patton & Sawicky (dalam Nugroho 2003:85) seorang analis kebijakan harus mempunyai kecakapan-kecakapan sebagai berikut: Cepat memfokuskan diri pada kriteria keputusan yang paling sentral, Mempunyai kemampuan analisis multi-disiplin, walaupun tidak, ia harus bisa mengakses sumber pengetahuan diluar disiplin yang dikuasainya, Kemampuan dalam mempertimbangkan tindakan kebijakan yang bisa diambil, bisa menghindari pendekatan toolbox (atau textbook) dalam menganalisa kebijakan, sebaliknya, harus bisa menggunakan metode paling sederhana yang tepat dan memanfaatkan logika dalam mendesain metode jika metode yang diinginkan tidak tersedia, mampu mengatasi ketidakpastian, mampu membuktikan dengan angka (tidak hanya asumsi-asumsi kualitatif), mampu membuat rumusan analisa yang sederhana namun jelas, mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan,

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya, mampu mengontrol diri hanya sebagai penganalisa kebijakan, bukan keputusan, mampu tidak saja mengatakan ya atau tidak pada usulan yang masuk, tapi juga bisa mendefinisikan dan menganalisa usulan tersebut, bisa menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional, dan sama sekali komplet, mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik, dan mempunyai etika profesi yang tinggi.

Selanjutnya Dunn (1992) mendefinisikan bahwa: Analisa kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan adalah proses intelektual yang mengawali perumusan kebijakan yang biasanya bersifat politis.

Namun demikian, bukan berarti analisa kebijakan tidak memasukkan variabel politik didalamnya. Berkenaan dengan analisa kebijakan, Dunn mengenalkan skema Proses analisa kebijakan, sebagai berikut:

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



Proses Analisis Kebijakan / Gambar 2.2: Proses Analisis Kebijakan Dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kebijakan publik, Dunn (1992) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu: penetapan agenda kebijakan (agenda setting); formulasi kebijakan (policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption) isi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). 2.3

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, yang juga menentukan apakah kebijakan tersebut mampu menjangkau kepentingan publik dan dapat diterima oleh publik. Bisa saja kebijakan dalam tahapan perencanaan dan perumusan formulasi

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika tahapan pada implementasinya, tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tidak ada yang bisa diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa formulasi dan implementasi kebijakan tidak berjalan beriringan, atau bisa dikatakan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, sebaliknya justru menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, Adiwisastra (dalam Tachjan, 2006:xii) menegaskan, bahwa : "Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting.

Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi "macan kertas? apabila tidak berhasil dilaksanakan". Selanjutnya, masih menurut

Adiwisastra (dalam Tachjan, 2006:xiv) bahwa : Berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.

Berkenaan dengan domain implementasi kebijakan tersebut, Edwards III (1980:1) menegaskan bahwa: The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of

an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented.

But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers. Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal dalam suatu undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, serta keluarnya putusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan – dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik. Sementara Mazmanian dan Sabatier (dalam Abdul Wahab, 1997:53) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang Undang, namun bisa pula berbentuk peraturan, keputusan eksekutif yang bersifat penting dan juga keputusan badan peradilan.

Biasanya, keputusan tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyampaikan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, serta cara-cara lainnya untuk menstruktur/mengatur proses implementasi. Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, impementasi kebijakan berhubungan dengan konflik, keputusan, dan untuk siapa hasil dari sebuah kebijakan.

Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Begitu pentingnya tentang implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan.

Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus didelegasikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi tidak hanya harus diterima, akan tetapi

mesti juga jelas. Jika tidak, maka para implementor akan kacaudengan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) untuk mendorong tinjauannya dalam implementasi kebijakan, memandang bahwa mungkin berbeda dengan pandangan seorang Top Manajemen.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa diimplementasikan jika tujuan dan sasaran yang pada mulanya masih bersifat umum telah dirumuskan secara rinci, programnya telah dirancang, dan serta pengalokasian dana telah ditetapkan. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksana kebijakan (policy stakeholders) serta lingkungannya (environment), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan (policy environment) yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi.

sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya. Kemudian Van Metter dan Van Horn (dalam Wibawa, 1994:19), mendefinisikan bahwa: Implementasi Kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan abstraksi yang menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang berdampak pada hasil atau kinerja kebijakan.

Kapasitas kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

tujuan tertentu yang harus diraih oleh para pelaksana kebijakan. Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu_individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengubah sebuah keputusan menjadi suatu _tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu ataupun untuk melanjutkan usaha dalam membuat sebuah perubahan baik besar ataupun kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan. 2.4 Beberapa Model Implementasi Kebijakan Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.

Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut (Kadji, 2008:36)

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Apapun produk kebijakan itu menurut Kadji (2008 : 36) “pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi”. Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (policy implementation), maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik, yaitu: 1.

George Edwards III (1980:9) mengemukakan: “In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?” Edwards III (1980:10) kemudian mempertimbangkan dan menawarkan empat faktor dalam proses implementasi kebijakan publik, yakni: “Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure”.
/ Gambar 2.3

: Model Implementasi Kebijakan menurut Edwards III 18

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak- efektifan penerapan kebijakan.

Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut. 2. Model Meter dan Horn Donald Van Meter dan Carl Van Horn, (dalam Kadji, 2008 : 42) menegaskan bahwa: "Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik".

Terdapat beberapa variabel yang dimasukkan sebagai sesuatu hal yang mempengaruhi proses kebijakan publik yakni: Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik dan agen pelaksana/implementor, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/ impiementor.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Penegasan Van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini: /
Gambar 2.4 : Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn 3.

Model Mazmanian dan Sabatier Model Kerangka Analisis Implementasi (A Framework for Implementation Analysis) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel utama, yakni : Pertama, variabel independen; mudah tidaknya masalah dikendalikan berkaitan dengan indikator masalah teori dan teknis implementasi, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening; kemampuan kebijakan untuk membentuk proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis antara lembaga pelaksana, aturan, lembaga pelaksana, serta perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

di luar kebijakan yang berdampak pada proses implementasi yang berkaitan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen; bagian dari proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: i) pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, ii) kepatuhan obyek, iii) hasil nyata, iv) penerimaan atas hasil nyata. / Gambar 2.5 : Model Implementasi Kebijakan

menurut Sabatier dan Mazmanian Model diatas menyiratkan sebuah pengakuan bahwa meskipun formulasi kebijakan sejak awalnya telah dirumuskan melalui proses bargaining position and power, pertarungan atau konflik kepentingan maupun persuasi, tidak berarti para aktor kebijakan menghentikan intervensinya ketika kebijakan mulai diimplementasikan.

Justru para aktor

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

kebijakan tersebut, baik politisi, kelompok penekan, birokrat tingkat atas maupun bawah, dan kelompok sasaran sendiri seringkali lebih intensif memperjuangkan kepentingannya pada tahap implementasi. 4. Model Hoogwood & Gun Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:131) mengemukakan bahwa diperlukan beberapa syarat untuk melakukan implementasi kebijakan yaitu: 1) Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 2) Ketersediaan sumberdaya yang mencukupi termasuk sumberdaya waktu.

3) Kombinasi sumber daya yang dibutuhkan. 4) kebijakan yang akan diimplementasikan harus didasari hubungan kausal yang andal. 5) Banyaknya hubungan kausalitas yang terjadi dengan asumsi semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", maka semakin tinggi tingkat pencapaian hasil yang dikehendaki. 6) tingkat hubungan saling ketergantungan yang rendah sebab, jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi justru tidak akan dapat berjalan secara efektif.

7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam mencapai tujuan. 8) perincian dan pengurutan tugas-tugas secara tepat. 9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10) pihak- pihak yang memiliki wewenang kekuasaan bisa menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Sebenarnya, model Hogwood dan Gunn mendasarkan kepada konsep manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang teratur dan mengindahkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional. 5.

Model Grindle Model Grindle (dalam Nugroho, 2006:134) ditentukan oleh: "Isi kebijakan dan konteks implementasinya". Ide dasar dari model ini adalah implementasi kebijakan yang dilakukan setelah kebijakan ditransformasi. Keberhasilannya bergantung pada derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis faedah yang nantinya akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diharapkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Pelaksana program, serta 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah: 1) Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

/ Gambar 2.6 : Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle 23

Dari model diatas, maka yang dimaksudkan dengan konteks kebijakan dapat diuraikan yaitu: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi. 6. Model Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter Menurut Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter (dalam Nugroho, 2006:134): "Model ini di mulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat di dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki".

Dasar dari model implementasi ini adalah jenis kebijakan publik yang menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan sendiri implementasi kebijakannya, walaupun masih harus melibatkan pejabat pemerintah, maka hanya pejabat pemerintah tatanan bawah yang bisa dilibatkan. Oleh sebab itu, Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan harapan dan keinginan publik yang menjadi target, dan disesuaikan juga dengan kemampuan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diinisiasi oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada prinsipnya Model implementasi tersebut dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut : a. Mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat jenis kebijakan publik yang menggerakkan masyarakat untuk mengerjakan implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level terbawah.

Kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target.

Prakarsa Masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, yaitu (i) content of policy & context implementation, meliputi: (a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (c) derajat perubahan yang diinginkan, (d) kedudukan pembuat kebijakan, (e) pelaksana program, (f) sumber daya yang dikerahkan.

Dan Konteks Implementasinya, meliputi: (a) kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat, (b) karakteristik lembaga dan penguasa, (c) kepatuhan dan daya tanggap. Sementara (ii) dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri, meliputi: (a) manfaat dari program, (b) perubahan dan peningkatan kehidupan kepada masyarakat. 7. Model Jan Merse Jan Merse (dalam Koryati, 2004:16) mengemukakan bahwa : "Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) Informasi, b) Isi Kebijakan, c) Dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan d) Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program". Penegasan diatas menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan program pasti membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat sebagai stakeholder. Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

8.

Model Warwic Warwic (dalam Subarsono, 2005:99) mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor_faktor yang perlu diperhatikan, yaitu a) Kemampuan Organisasi, b) Informasi, c) Dukungan, dan d) pembagian potensi". Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari : Tiga unsur pokok yaitu: (i).

Kemampuan teknis, (ii). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait. (iii). Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOP (Standard Operating Prosedures), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

Informasi; terbatasnya informasi dari para pelaksana terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.

Pembagian potensi, pembagian wewenang, serta tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

9. Model Rippley dan Franklin Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005:99) bahwa kesuksesan implementasi kebijakan program bisa dinilai dari tiga faktor yakni: perspektif kepatuhan yang menilai keberhasilan implementasi berdasarkan kepatuhan aparatur pelaksana, keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran ritunitas dan tiadanya persoalan, dan implementasi yang menghasilkan kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program. 10.

Model Charles Jones Charles Jones (dalam Ricky Istamto, 1996:296) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat dilaksanakan, dan 3) Pelaksanaan, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat dilaksanakan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Apa yang dikemukakan sebagai pegangan bagi para penerima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan implementor kebijakan, dengan menyadari bahwa implementasi kebijakan itu merupakan hal yang paling berat, karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul di lapangan disaat kebijakan itu diimplementasikan.

11.

Model MSN-Approach atau Model YK Menurut Kadji (2008 : 55) bahwa pengembangan model implementasi kebijakan, perlu menyetengahkan formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan mentality, systems, and networking atau disebut Model Implementasi Kebijakan melalui MSN-Approach. **Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi Policy of Stakeholders, yaitu : Government, Private Sector, dan Civil Society.**

Oleh karena itulah, masih menurut Kadji (2008 : 56) bahwa sebuah produk kebijakan apapun yang siap **diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi policy of stakeholders** atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan, yaitu : Government, Private Sector, dan Civil Society. Ketiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan public tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini : / Gambar 2.7

: Tiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan publik versi Kadji (2008:57)

Dari ilustrasi gambar diatas, selanjutnya Kadji (2008 : 57-58) menegaskan bahwa dalam domain Good Governance terdapat tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik dan pengelolaan tata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yakni Government, Private Sector, dan Civil Society.

Pemerintah (Government) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor Swasta (Private sector) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki skills tertentu, maka seharusnya mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Masyarakat madani (Civil society) sebagai pihak yang mestinya menyadari bahwa masyarakat tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan, tapi sekaligus juga sebagai subjek dari kebijakan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan, dimulai sejak perencanaan, dan pelaksanaan, pengawasan, serta yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan masyarakat dalam mengamankan hasil-hasil pembangunan yang benar_benar bersentuhan dengan kepentingan publik.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

2.5

Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu Yang Relevan Berkenaan dengan Penelitian tentang Pemetaan Dampak Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo, maka dapat dikemukakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan itu, diantaranya penelitian yang berjudul Implementasi program pendidikan bersubsidi di Kabupaten Jember (2008) yang menyimpulkan bahwa pola pendidikan bersubsidi dikalangan siswa/siswi baik ditingkat SD maupun SMP, kunci keberhasilan program tersebut pada akhirnya terletak pada peran aktif pemerintah kabupaten setempat dengan cara mendukung dan membantu agar kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan lancar, tanpa harus menarik biaya pendidikan dari kalangan yang tidak mampu. Selanjutnya menurut Bupati Jember Prof.drg.l

Gede Winasa dampak dari penerapan kebijakan ini sangat luar biasa karena bisa menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan, serta kebijakan itu juga menimbulkan kebiasaan baru dikalangan sekolah dalam membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) yang lebih terencana, efektif dan efisien. Selanjutnya Cepi Syafrudin dalam penelitiannya "Analisa Penerapan Subsidi Sekolah" mengemukakan bahwa realisasi subsidi berkeadilan ini perlu dilaksanakan dengan sungguh sungguh sebagai implementasi kebijakan dan program pembangunan pendidikan di kota Cilegon.

Dijelaskan bahwa penerapan subsidi berkeadilan merupakan pendukung penuntasan wajib belajar (wajib) pendidikan 12 tahun. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat adekuasi/ketercukupan program paling banyak responden (23.8%) menyatakan bahwa kemampuan kompensasi dana sumbangan pendidikan (DSP) membiayai

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

kebutuhan penyelenggaraan PBM/KBM adalah antara 80 %-90% kebutuhan PBM/KBM yang ada. Sedang untuk peningkatan mutu paling banyak responden (23.8%) menyatakan bahwa program ini mampu mencukupi semua (100%) kebutuhan upaya peningkatan mutu.

Dan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, paling banyak responden (38.1%) mengatakan berkemampuan antara 40-70 % saja. Sementara itu hasil studi banding PKK Kabupaten Gorontalo/DPD di Makassar (2012) membahas tentang program model pendidikan bersubsidi penuh menunjukkan ada semangat pemerintah daerah menjamin anggaran pendidikan baik dari mutu kualitas dan kuantitas siswa sebagaimana yang dicontohkan dari 400 jumlah SD se Kota Makassar terdapat 158 SD yang memperoleh subsidi penuh. Ini ditunjukkan pula dengan kenaikan anggaran APBD 2012, pemerintah kota Makassar mengalokasikan anggaran sebesar Rp.

52,7 miliar untuk pendidikan bersubsidi di Makassar, angka ini meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yakni 51.7 miliar. (Makassarterkini.com). Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan diatas bahwa program pendidikan bersubsidi sangat membantu siswa/siswa yang sangat membutuhkan dana untuk biaya studi maupun untuk menunjang proses belajar mengajar dan kegiatan belajar mengajar.

Dipihak lain sangat dibutuhkan peran/kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan program ini sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan anak bangsa.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 3.1 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menganalisis dan mendiskripsikan proses

implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo Menganalisis dan mengetahui siapa aktor dalam proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo.

Menganalisis dan mengetahui dampak implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo, baik pada tingkat Pendidikan Dasar maupun pada Tingkat Pendidikan Menengah 3.2 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam perumusan kebijakan pendidikan, khususnya: 1. Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka memperbaiki pola layanan pendidikan kepada masyarakat dan memperbaiki model kebijakan public dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan



2.

Bagi kalangan perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu dan pengetahuan dibidang administrasi public.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab IV METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Desain Penelitian Penelitian ini akan didesain dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui teknik wawancara, FGD, dan teknik dokumentasi.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo. (2) Siapa Aktor dalam proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo. (3) Bagaimana dampak implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo, baik pada tingkat Pendidikan Dasar maupun pada Tingkat Pendidikan Menengah.

4.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data tentang program yang telah dilaksanakan oleh dinas terkait maupun para implementor, sedang data sekunder adalah dokumen yang ada serta dasar pelaksanaan dalam bentuk aturan dan hal-hal lainnya. 4.3

Instrumen Penjaring Data Instrumen penjaringan data penelitian dibuat oleh peneliti, dengan memperhatikan alur instrumentasi penelitian berikut ini:

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id



/ Gambar 4iAlur Instrumentasi Penelitian

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 5.1.1 Keadaan Penduduk Kota Gorontalo Jumlah penduduk Kota Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan peningkatan sebesar yaitu dari 165.175 jiwa tahun 2008 menjadi 201.509 jiwa tahun 2012 dengan rata-rata per tahun sebesar 3,35% dan pada tahun 2013 berjumlah sebesar 190.492 jiwa, terdiri dari laki-laki 94.848 jiwa dan perempuan 95.844 jiwa dengan angka sex ratio 100.

Secara rinci kondisi kependudukan Kota Gorontalo terlihat pada tabel berikut : Tabel: 5.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Tahun 2008 – 2013 /

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Terlihat dalam tabel, bahwa kenaikan jumlah penduduk berdasarkan data absolute terjadi kenaikan yang signifikan, sedangkan kondisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2013 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel: 5.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex-Ratio di Kota Gorontalo dirinci per Kecamatan Tahun 2013 Kecamatan Kota Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, diikuti dengan Kecamatan Kota Timur. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Hulontalo. Dilihat dari sex-ratio, maka nilai tertinggi ada di Kecamatan Hulontalo, diikuti Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Kota Utara dan Sipatana.

Nilai sex ratio terkecil adalah kecamatan Kota Tengah, Kota Selatan dan Kota Barat.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Keadaan penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (dependency ratio) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu.

Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel: 5.3 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Gorontalo 2008 s/d 2013 /

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 15 – 19 tahun, diikuti kelompok umur 5 – 9 tahun dan kelompok usia 10 – 14 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia sekolah dan mahasiswa.

Kondisi ini merupakan potensi angkatan kerja yang cukup besar di Kota Gorontalo, dari data tersebut dapat dihitung perkembangan angka ketergantungan (dependency ratio). Hasil pendataan penduduk pada tahun 2013 menunjukkan jumlah kepala keluarga dan jumlah rata-rata anggota keluarga untuk setiap kepala keluarga yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel: 5.4

Jumlah Penduduk, KK dan Rata-Rata Anggota Keluarga tahun 2013 / Kecamatan Kota Tengah memiliki jumlah KK terbesar dengan jumlah anggota keluarga 7.931. Diikuti kecamatan Duingingi dan Kota Timur. Sedangkan jumlah anggota terkecil

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

adalah kecamatan Sipatana dengan jumlah 3.508 dan tertinggi adalah kecamatan Kota Tengah dengan jumlah 7.931.

Dilihat perkembangan jumlah KK dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi kenaikan jumlah KK, sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga tidak mengalami perubahan, kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat tingkat kesadaran masyarakat dengan jumlah rata-rata anggota keluarga yang kecil, berarti menuju keluarga bahagia sejahtera. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo dari tahun 1990, 2000 dan 2008-2013 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel: 5.5 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo

Tahun 1990, 2000, dan 2008-2013 / Laju pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari laju pertumbuhan relative cenderung tinggi karena berkisar antara 2,93 sampai 3,35, yang paling rendah terjadi tahun 1990 laju pertumbuhan hanya sekitar 1,19.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Dilihat laju pertumbuhan penduduk antar kecamatan terdapat perbedaan, dimana ditentukan oleh kondisi dan potensi daerah.

Laju pertumbuhan terbesar tahun 2012 terjadi di kecamatan Dungingi, karena kecamatan Dungingi daerah padat penduduk. Sedangkan laju pertumbuhan terkecil terjadi di kecamatan Kota Selatan, hanya mencapai 1,42. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini" Tabel: 5.6

Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan

Tahun 2008 – 2012 / 5.1.2 Kondisi Obyektif Perkembangan Pendidikan Kota Gorontalo Potret kondisi pendidikan di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa biaya sekolah yang tinggi masih menjadi beban bagi siswa yang tidak mampu serta menjadi permasalahan utama di sektor pendidikan.

Untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, maka perlu adanya Pendidikan bersubsidi di Kota Gorontalo seperti yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota No:136/17/V/2012 tentang Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo. Belakangan ini, pemerintah sudah menyiapkan sebuah paket bantuan pendidikan yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan total anggaran sebesar Rp 3,9 triliun untuk menghadapi dampak terburuk dari meningkatnya inflasi. BSM adalah gagasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berupa penyediaan dana sebesar Rp. 450.000 untuk setiap pelajar di tingkat SD, Rp. 700.000 bagi pelajar SMP, dan Rp. 1.000.000 bagi pelajar SMA per tahunnya.

Besar anggaran pendidikan kita di Kemendiknas berjumlah hampir Rp. 64 triliun. Tentu angka sebesar ini harus dipertimbangkan kembali, dengan cara membagi subsidi untuk setiap tingkat pendidikan. Menurut logika bisnis pendidikan, pola pengeluaran anggaran pemerintah yang tidak seimbang menjadi salah satu penyebab distribusi pendapatan yang tidak merata di **tengah-tengah masyarakat. Kelompok orang mampu menikmati lebih banyak subsidi dari APBN dibandingkan dengan masyarakat miskin.**

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Memperbaiki biaya pendidikan, tanpa harus mempertimbangkan kemungkinan perbaikan kualitas, sebagai akibat dari perbaikan sistem insentif, adalah salah satu bentuk reformasi harga untuk memperbaiki pengaruh anggaran terhadap distribusi pendapatan. Mengingat pentingnya pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan perbaikan distribusi pendapatan di Kota Gorontalo, maka porsi pengeluaran untuk pendidikan pun harus meningkat. Tapi, prioritasnya yaitu untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kebutuhan mayoritas penduduk Gorontalo.

Oleh sebab itu, akses pendidikan untuk kelompok tidak mampu perlu dibuka seluas-luasnya. Konsepnya, pemerataan tanpa membeda-bedakan siswa pintar dan tidak pintar dengan fokus pada pendidikan dasar dan menengah harus terus dilanjutkan dan diawasi. Adapun aturan subsidi pendidikan di Kota Gorontalo yang tengah dijalankan adalah implementasi subsidi silang pada pembiayaan pendidikan.

Dimana tidak ada penggratisan biaya, kecuali bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. Sedangkan siswa yang berasal dari keluarga mampu harus membayar biaya sekolah. Penerapan program kegiatan tersebut sedang dilaksanakan pada setiap sekolah di Kota Gorontalo sebagai bentuk kebijakan, inovasi dan implementasi tata kelola

pendidikan agar siswa yang tidak mampu dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengah dengan meningkatkan mutu layanan melalui pemerataan, partisipasi dan investasi pendidikan.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan visi pembangunan khususnya di bidang pendidikan tahun 2008 – 2013 adalah tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan untuk semua jenjang pendidikan, sistem layanan pendidikan dengan tersedianya sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan operasional untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas dan professional, pengelolaan pendidikan berkualitas yang disesuaikan dengan 8 (delapan) standar penyelenggaraan pendidikan nasional, optimalisasi pembiayaan pendidikan yang proporsional dan berkelanjutan, manajemen layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dan terwujudnya peran serta masyarakat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka strategi dan hasil yang dicapai, diantaranya adalah penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang PAUD dengan cara mengoptimalkan ruang-ruang pemerintah dan fasilitas umum yang ada di RT dan RW sebesar 50%, penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada sekolah yang SPM nya rendah yaitu sebesar

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

71%,penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset dan standar disemua jenjang pendidikan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan 100%,penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran paket A sebesar 78%, paket B sebesar 65% dan paket C sebesar 57% yang berkualitas dan merata di seluruh kecamatan,penyediaan dukungan dana sharing untuk dana BOS pada jenjang pendidikan dasar dan menyediakan dana BOM untuk jenjang pendidikan menengah demi meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan100%, menyediakan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional untuk semua jenjang pendidikan yang difokuskan kepada sekolah yang mempunyai kinerja rendah (lulusan rendah) sebesar 96,26%, penyediaan tutor berkompeten untuk pendidikan Non Formal yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup yang diarahkan pada daerah terpencil dan wilayah yang mempunyai buta aksara yang tinggi, dimana capaian tutor sebesar 58% dan Buta Aksara sebesar 87%. 5.2 Pembahasan 5.2.1

Proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi Kota Gorontalo Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo merupakan rangkaian kegiatan pembiayaan pembangunan pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan bersumber dari Masyarakat.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Kebijakan Pendidikan bersubsidi dalam proses implementasinya bermuara pada pembiayaan operasional pendidikan yang merupakan bagian dari dana pendidikan yang dibutuhkan untuk pembiayaan kegiatan operasional satuan pendidikan agar kegiatan pendidikan bisa berlangsung sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Konkritnya bahwa kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo diselenggarakan dalam bentuk implementatif, meliputi: Memberikan subsidi biaya operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah; Untuk SDL, SMP/SMPLB, SMA/dan SMK membiayai kegiatan operasional sekolah yang tidak didanai oleh dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan sumber dana lainnya.

Besaran pendanaan dan penggunaan Pendidikan Bersubsidi pada tingkat satuan pendidikan yakni: SMA dan SMK : Rp 1.000.000 / Siswa / Tahun TK/PAUD/SD/SMP : Rp 5.000.000/Sekolah/Tahun Dalam proses implementasi kebijakan Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo, dapat dijelaskan bahwa dana pendidikan bersubsidi yang diterima oleh SMA/SMK digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagai berikut: 1.

Peningkatan Manajemen Sekolah/Operasional Sekolah (30%), meliputi:

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk pengadaan alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk **pengelolaan manajemen ekolah dan proses belajar mengajar. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah.** Biaya daya dan jasa adalah biaya yang digunakan untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air.

Biaya transport/perjalanan dinas adalah biaya untuk kegiatan perjalanan dinas tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk mendukung program dan kegiatan sekolah. Perjalanan dinas luar daerah hanya dapat digunakan sekali dalam satu tahun anggaran. Biaya insentif penunjang program/kegiatan (Wali Kelas, Piket, Pembina kegiatan ekstrakurikuler, Pokja untuk SMK) Biaya konsumsi rapat.

Membiayai kegiatan penunjang yang diselenggarakan Pemerintah kota Gorontalo. 2. Peningkatan Mutu (50%), yang meliputi: Pembiayaan bimbingan belajar persiapan Ujian Nasional (bukan sebagai jam tambahan). Pengembangan profesi guru melalui kegiatan MGMP. Biaya pembinaan siswa pada kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler. Biaya Praktek Kerja Industri (Prakerin).

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Pembelian / pengadaan buku referensi. Pembelian bahan praktikum IPA, IPS, Bahasa dan Produktif yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Monitoring dan Evaluasi (20%), yang meliputi: Subsidi pelaksanaan evaluasi belajar tengah semester dan evaluasi belajar tahap akhir. Biaya pelaporan 5.2.2 Teknis Pelaksanaan dalam Proses Implementasi Pendidikan Bersubsidi Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di kota Gorontalo turut memperhatikan teknis pelaksanaan yang mengacu pada **Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** dan Permendagri No.

59 **Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan** Daerah. Berikut juga diatur tentang mekanisme penyaluran dana Pendidikan Bersubsidi, sebagai berikut: Penyaluran dana pendidikan bersubsidi untuk sekolah negeri melalui kas daerah ke bendahara Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya diserahkan ke bendahara masing-masing sekolah.

Penyaluran dana pendidikan bersubsidi untuk sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat dari DPPKAD ke masing-masing sekolah penerima dana pendidikan bersubsidi.

3. Penyaluran dana akan diberikan secara periodek (per_triwulan) kecuali untuk PAUD, TK, SD dan SMP. Selanjutnya Pengelolaan dana pendidikan bersubsidi dikelola secara mandiri dengan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sekolah mengelola dana pendidikan bersubsidi secara professional, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada sistem penatausahaan keuangan daerah yang berlaku dan ketentuan lainnya.

Sekolah harus menyusun RencanaiiiiKerjaiiiiTahunan (RKT) dalam bentuk Rencana KegiataniidiidaniiiiAnggaran Sekolah (RKAS), dimana dana pendidikan bersubsidi merupakan integrasi dari RKAS tersebut. RKT dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru dan Komite Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pendidikan dan disahkan oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah diketahi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program pendidikan yang ada pada tingkat satuan pendidikan.

Apabila ada perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setelah RKAS ditetapkan, maka kepala sekolah boleh merubah program dan kegiatan tersebut pada RKAS dengan mengajukan permohonan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi, ditegaskan pula hal-hal yang dilarang dalam penggunaan dana pendidikan bersubsidi, yakni: Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari dana pemerintah pusat atau provinsi berdasarkan ketentuannya. Pembiayaan kegiatan yang membutuhkan biaya besar serta bukan prioritas sekolah.

Membiayai perjalanan dinas luar daerah kepala sekolah, guru, komite sekolah, yang tidak berkaitan secara langsung dengan kebutuhan sekolah. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru. Digunakan untuk rehabilitasi sarana/prasarana sekolah yang berskala sedang dan berat. Membangun gedung/ruang kelas baru. Pembelian bahan/peralatan yang tidak dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 5.2.3

Aktoriidalam Proses Implementasi Kebijakan PendidikaniiiBersubsidi di Kota Gorontalo Kebijakan pendidikan bersubsidi di Kota Gorontalo yang implementasinya sejak tahun 2012, dapat ditelusuri dan dicermati siapa aktor atau implementor (pelaksana) kebijakan pendidikan bersubsidi tersebut, yang meliputi: 1. Dinas Pendidikan Kota Gorontalo sebagai SKPD Leading Sector Implementasi Kebijakan Pendidikan Bersubsidi, yang secara structural sebagai berikut: a.

Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Sekolah Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai pengendali teknis administratif penyelenggaraan kebijakan pendidikan bersubsidi. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo yang mengesahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan termasuk didalamnya berkaitan dengan dana pendidikan bersubsidi, yang sebelumnya telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Gorontalo.

Inspektorat Kota Gorontalo sebagai lembaga audit keuangan terhadap tata kelola penggunaan dana pendidikan bersubsidi. Dewan Pendidikan, yang member pertimbangan terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berhubungan dengan penggunaan dan tata kelola dana pendidikan bersubsidi.

Pelaksana teknis kebijakan pendidikan bersubsidi di tingkat satuan pendidikan, yakni: Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan dana pendidikan bersubsidi. Komite Sekolah, bersama-sama dengan kepala sekolah melalui rapat dewan guru membahas dan mengesahkan RKT dan RKAS yang berkenaan dengan penggunaan dana pendidikan bersubsidi pada masing- masing satuan pendidikan. 5.2.4 Tugas dan Tanggungjawab Sekolah Penerima dana Pendidikan Bersubsidi 1.

Bagi SMA, SMK, dan MA wajib membuat: Mengisi dan menyerahkan Laporan Kerja Individual Siswa (LKIS) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pendidikan Bersubsidi di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Melaporkan perubahan data jumlah setiap triwulan kepada PPTK Pendidikan Bersubsidi di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 2. Kepala Sekolah bertanggungjawab dan transparan dalam penerimaan dan penggunaan dana. 3.

Sekolah penerima melakukan pembukuan secara tertib dan benar berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. 4. Sekolah penerima membuat laporan setiap triwulan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo tentang penggunaan dana pendidikan bersubsidi dan barang/jasa yang dibeli oleh **sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite** sekolah. 5.2.5

Dampak implementasi kebijakan pendidikan bersubsidi di Kota Gorontalo 5.2.5.1 Dampak Pendidikan Dampak pendidikan dari implementasi kebijakan pendidikan

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

bersubsidi di Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perkembangan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Tahun 2013 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Dasar mencapai 110,3%, APS Sekolah Menengah Pertama sebesar 120,6% dan APS Sekolah Menengah Atas sebesar 112,06% pada tahun yang sama. 2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase siswa dengan usia yang ada kaitannya dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi jumlah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu.

Dengan demikian APM juga berfungsi sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah dalam setiap jenjang pendidikan. Perkembangan APM di jenjang pendidikan dasar masih lebih baik dan meningkat stabil dibandingkan jenjang pendidikan, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini. APM jenjang pendidikan SD/MI meningkat sebesar 3,43% tahun 2008 ke tahun 2013, sehingga tahun 2013 APM SMP/MTs Kota Gorontalo mencapai angka 105,02%.

Untuk APM SMP/MTs meningkat sebesar 1,92% dari 82,47% tahun 2008 menjadi 84,39% di tahun 2013. Sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA menurun dari 71,28% pada Tahun 2008 ke 64,12 pada Tahun 2013. Tabel: 5.8 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tahun 2008 - 2013 Kota Gorontalo / APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi APK Kota Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel: 5.9 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tahun 2008 – 2013 Kota Gorontalo / 3.

Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (dewasa) adalah jumlah penduduk berusia

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dengan menggunakan huruf latin atau lainnya. Dimana AMH ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan penduduk dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, sehingga angka melek huruf bisa menggambarkan potensi perkembangan intelektual sekaligus mengukur seberapa besar kontribusi penduduk terhadap pembangunan daerah.

Persentase angka melek huruf di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2008 persentase AMH mencapai 93,50% dan terus mengalami peningkatan secara signifikan sehingga tahun 2013 mencapai angka sebesar 99,87%. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai pelaksanaan program pendidikan termasuk pendidikan formal Paket A, B dan C dan program penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Tabel: 5.10 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2013 Kota Gorontalo / 4. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Lama Sekolah atau years of schooling adalah angka yang menampilkan periode seseorang bersekolah sejak masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT).

Angka rata-rata lama sekolah diartikan dengan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. Lamanya bersekolah adalah ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut.

Namun, lama sekolah ini turut mengakumulasi kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (under estimate). Dari data tabel komponen penyusun IPM dibawah ini terlihat angka rata-rata lama Kota Gorontalo sebesar 10,28 di tahun 2012.

Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah kabupaten lainnya dan bahkan dengan Provinsi Gorontalo, maka Kota Gorontalo masih lebih tinggi angka rata-rata lama sekolah. Ini bisa diartikan bahwa penduduk Kota Gorontalo di usia sekolah lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersekolah dibanding kabupaten lainnya di

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Provinsi Gorontalo.

Tabel: 5.12 Komponen Penyusun IPM Gorontalo tahun 2012 5.2.5.2 Dampak Sosial Budaya Pendidikan bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo memberikan dampak positif secara sosial budaya, yaitu antara lain: tumbuh dan berkembangnya semangat kepedulian dan partisipasi masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi terhadap pembangunan pendidikan di Kota Gorontalo tumbuh dan berkembangnya semangat kekeluargaan dan kekerabatan antara sesama orang tua murid, yang diwujudkan melalui kegiatan Komite Sekolah.

Misalnya kegiatan santunan bagi orang tua miskin, bakti sosial, kegiatan donor darah, dan sebagainya. tumbuh dan berkembangnya interaksi antara guru, murid dan orang tua melalui kegiatan pertemuan formal sekolah maupun pertemuan informal, baik yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, komite sekolah maupun orang tua siswa 5.2.5.3

Dampak Ekonomi Adapun dampak ekonomi dari program pendidikan bersubsidi adalah sebagai berikut : 1. PDRB perkapita masyarakat menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2012 secara agregat PDRB per kapita Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku sebesar 11,13 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap penduduk Kota Gorontalo memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 11,13 juta selama tahun 2012 atau naik sekitar 13,30 persen dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2000, PDRB per kapita penduduk kota Gorontalo sebesar 3,7 juta rupiah atau naik Alokasi anggaran yang biasanya disiapkan oleh masyarakat untuk kepentingan belanja pendidikan, bisa dialihkan untuk kepentingan lainnya seperti belanja konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut Tabel: 14 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2008 - 2012 Kota Gorontalo / Oleh karena itu menjadi penting untuk dipertimbangkan bahwa konsep dan implementasi program pendidikan bersubsidi ini untuk tetap dilanjutkan dan dikombinasikan dengan program pendidikan gratis yang saat ini sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo periode 2014- 2019.

Mengingat bahwa konsep dan implementasi program pendidikan bersubsidi dan program pendidikan gratis memiliki semangat dan orientasi yang sama yaitu peningkatan layanan pendidikan kepada masyarakat.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab VI RENCANA TINDAK LANJUT Berdasarkan kajian terhadap hasil-hasil penelitian di atas, maka diperlukan adanya tindak lanjut penelitian untuk rencana tahapan selanjutnya.

Beberapa hal penting yang perlu ditindak lanjuti antara lain adalah : Pengembangan Layanan Pendidikan untuk tujuan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan secara nasional, regional dan lokal harus sikron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini mengingat bahwa terdapat beberapa program yang memiliki kesamaan dalam implementasinya.

Misalnya secara nasional, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengembangkan Kartu Indonesia Pintar; di tingkat Provinsi Gorontalo Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengembangkan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA); sedangkan di Kota Gorontalo mengembangkan Program Kartu Sejahtera, di mana salah satu kegiatannya adalah Pendidikan Gratis.

Oleh karena itu di perlukan model pengembangan layanan pendidikan yang dapat mensinkronkan berbagai program layanan pendidikan tersebut.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

Bab VII P E n U T U P 7.1 Kesimpulan Penyelenggaraan Program Pendidikan Bersubsidi di Kota Gorontalo sesungguhnya merupakan ikhtiar pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta sebagai upaya untuk meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua miskin.

Di mana dalam implementasinya program ini memiliki dampak positif yaitu: Dampak Pendidikan, di mana indikator pendidikan Kota Gorontalo menjadi lebih baik dan meningkat, khususnya terkait dengan Angka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, Angka Melek Huruf, dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Dampak Sosial Budaya, di mana kekerabatan dan kekeluargaan serta semangat kepedulian dan gotong royong orang tua murid semakin baik.

Dampak ekonomi yaitu PDRB Perkapita dan Pengeluaran Perkapita masyarakat Kota Gorontalo mengalami kenaikan. 7.2 Saran Konsep dan implementasi Program Pendidikan Bersubsidi kiranya dapat dilanjutkan dengan mengkombinasikan Program tersebut dengan Program Pendidikan Gratis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota saat ini.

Di mana alokasi anggaran pendidikan gratis lebih di arahkan pada peningkatan akses, sedangkan pendidikan bersubsidi di arahkan pada peningkatan mutu.

INTERNET SOURCES:

-
- <1% - www.slideshare.net/HidayatHFRocketmail/skripsi...
 - <1% - repository.ung.ac.id/.../1/Pemetaan...Di-Kota-Gorontalo.pdf
 - <1% - fitrianiibjasmanssev.blogspot.com/.../kondisi-pendidikan...
 - <1% - www.scribd.com/.../10857091/pembangunan-pendidikan
 - <1% - smpn1curugtangerang.wordpress.com/2008/10/26/...
 - <1% - masyarakatbelajar.wordpress.com/2010/12/19/...
 - <1% - insinyurpendidikan.blogspot.com/2012/01/uu-sisdiknas-no...
 - <1% - pendidikandankebudayaan.wordpress.com/2012/06/06/...
 - <1% - perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, sejarah dan berkesinambungan .
 - <1% - repository.ung.ac.id/get/simlit/2/1005/1/...Bersubsidi-Di...
 - <1% - repository.ung.ac.id/get/simlit/2/...Kebijakan-Pendidikan...
 - <1% - www.slideshare.net/yeftachristiono/tugas-jurnal...

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

<1% - dimana tidak ada pengertian biaya, kecuali bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.

<1% - informatikalen.blogspot.com/2014/08/contoh...

<1% - www.pengertianpakar.com/2015/...proses-kebijakan-publik.html

<1% - robisukron.blogspot.com/2015/01/kebijakan-publik-beserta...

<1% - setiya21.wordpress.com/2009/12/17/kebijakan-publik

<1% - www.academia.edu/12950415/Teori_Kinerja

<1% - erfansetiawan.blogspot.com/2011/...pembuatan-kebijakan.html

<1% - www.scribd.com/document/368420262/digital-129265...

<1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/04/makalah-tujuan...

<1% - makalahkuindonesia.blogspot.com/2017/...ilmu-kebijakan.html

<1% - asmoni-best.blogspot.com/2009/04/...analisis-kebijakan.html

<1% - kebijakanpublik12.blogspot.com/2012/05/pengertian...

<1% - kebijakanpublik12.blogspot.com/2012/05

<1% - idtesis.com/analisis-kebijakan-publik

<1% - www.scribd.com/presentation/261045295/Kebijakan...

<1% - repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2255/...

<1% - www.academia.edu/4485134/ANALISIS_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN...

<1% - www.academia.edu/...IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN_EMPAT...GORONTALO

<1% - repository.unpad.ac.id/.../implementasi_kebijakan_publik...

1% - docobook.com/1-implementasi-kebijakan-program.html

<1% - elib.unikom.ac.id/files/disk1/580/jbptunikompp-gdl-nurh...

<1% - www.studocu.com/en/document/university-of...

<1% - scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?...

<1% - repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53239...

<1% - docplayer.info/67461248-Implementasi-program...

<1% - seribumakalah.blogspot.com/...implementasi-kebijakan.html

<1% - www.bentengsumbar.com

<1% - akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/...

<1% - liestyodono.blogspot.com/...perumusan-kebijakan-publik.html

<1% - www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131329-T+27611...

<1% - anfisipusu.blogspot.com/2014/09/...kebijakan-publik.html

<1% - djaelanibahasaindonesia.blogspot.com/2016/03/...

<1% - www.scribd.com/document/341341599/sosialisasi...

<1% - www.scribd.com/document/267571574/Kebijakan...

<1% - blog.binadarma.ac.id/hardiyansyah/?m=201207

<1% - digilib.unila.ac.id/11248/7/BAB_II.pdf

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

- <1% - xpresipena.blogspot.com/2011/06/studi-implementasi...
- <1% - abdulgafur31.blogspot.com/2014/01/implementasi-kebijakan...
- <1% - memperjuangkan kepentingannya pada tahap implementasi. 4. model hogwood
- <1% - aldianegara.wordpress.com/tugas-kuliah-konsep...
- <1% - habibiarifin.blogspot.com/2010/05/model-model-implement...
- <1% - repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57360...
- <1% - digilib.unm.ac.id/files/disk1/4/universitas_negeri...
- <1% - kerjaituindah.blogspot.com/2011/06/model-model-kebijakan...
- <1% - arifaluddin.wordpress.com/2010/06/19/analisis...
- <1% - www.slideshare.net/MuhammadSharip/model-implementasi
- <1% - www.academia.edu/28653761/...Impementasi_Kebijakan_Publik
- <1% - www.slideshare.net/cymanja/bab-2-revisi
- <1% - downloadptkptsdsmpsma.blogspot.com
- <1% - all-about-theory.blogspot.com/2010/03/implementasi...
- <1% - www.scribd.com/document/388503958/9581-ID...
- <1% - jurnalonlineteknikunbara.files.wordpress.com/...
- <1% - voteforwinasa.wordpress.com
- <1% - staff.uny.ac.id/sites/default/files/132243758/Analisa...
- <1% - eprints.walisongo.ac.id/1117/6/081111010_Bab5.pdf
- <1% - jiwa, terdiri dari laki-laki 94.848 jiwa dan perempuan 95.844 jiwa dengan angka sex ratio 100.
- <1% - infopendidikanterbaruku.blogspot.com
- <1% - slideplayer.info/slide/2495750
- <1% - pengelolaan manajemen sekolah dan proses belajar mengajar. biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah.
- <1% - www.berkassekolah.com
- <1% - madrasahjatim.files.wordpress.com/2013/10/juknis...
- <1% - nurulchaeriah.blogspot.com/2013/10/tinjauan-atas...
- <1% - ayunkinfoperaturan.blogspot.com/2011/03/permendagri-no...
- <1% - 3. penyaluran dana akan diberikan secara periodik per triwulan kecuali untuk paud, tk, sd dan smp.
- <1% - materiku86.blogspot.com
- <1% - toddlertastes.blogspot.com
- <1% - issuu.com/radarbolmong/docs/radar_bolmong_edisi...
- <1% - www.informasiguru.com
- <1% - www.guru-up.date
- <1% - www.scribd.com/doc/306352609/Sulawesi-Utara...

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex JI. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id

- <1% - kurnia-geografi.blogspot.com/...partisipasi-murni-apm.html
- <1% - seruyankab.go.id
- <1% - anasyafriati.blogspot.com/2016/04/makalah-pendidikan-apk...
- <1% - ipsgampang.blogspot.com/2015/08/angka-partisipasi-kasar...
- <1% - docplayer.info/71588-Rencana-pembangunan-jangka...
- <1% - www.academia.edu/12971496/Indikator_Pendidikan_Kab...
- <1% - www.coursehero.com
- <1% - issuu.com/bappeda_jateng/docs/rpjmd2008_2013
- <1% - tamrinhayat.blogspot.com/2014/09/program-aplikasi-dalam...
- <1% - repository.ung.ac.id/get/...Dampak...Di-Kota-Gorontalo.pdf
- <1% - sedang dijalankan oleh pemerintah kota saat ini.

TRANSBAHASA

Professional Translation & Language Services

SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-0009641.AH.01.07.2017

JL. Ir.Hi. Joesoef Dalie (Ex Jl. Pangeran Hidayat) No. 78 Kota Gorontalo

Email. transbahasa.go@gmail.com / Phone. +62 853 9862 5876

www.transbahasa.co.id